



PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF

Listyo Cahyo Purnomo

Direktorat Jenderal Pajak, email: mr.untung86@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama

11 Maret 2016

Dinyatakan Dapat Dimuat
30 Mei 2016

KATA KUNCI:

corporate ownership,
tax aggressiveness,
Effective Tax Rate

ABSTRAK

Based on APBNP-2015, tax contributes about 70 percent of states revenue. In the other side, tax is a significant cost of business. Based on this, many companies are trying to reduce the cost of the tax through tax planning. This study aims to determine the effect of corporate ownership and tax aggressiveness, based on sample of LQ45 firms in IDX from 2010 to 2014. This study use Effective Tax Rate (ETR) as measurement of tax aggressiveness. The result of this study show: (1) a negative significant relationship between tax aggressiveness and family ownership; (2) a positive significant relationship between tax aggressiveness and government ownership; (3) and no significant relationship in foreign ownership. Negative sign of ETR indicates that the family ownership are more aggressiveness in tax planning.

Berdasarkan APBNP-2015 pajak menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan negara. Di sisi lain, pajak merupakan biaya yang signifikan dari bisnis. Berdasarkan ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi biaya pajak melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap tindakan pajak agresif, berdasarkan sampel perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 ke 2014. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran tindakan pajak agresif. Penelitian ini menemukan : (1) hubungan negatif yang signifikan antara tindakan pajak agresif dengan kepemilikan keluarga; (2) hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan pemerintah dengan tindakan pajak agresif; (3) tidak ada hubungan yang signifikan dalam kepemilikan asing. Tanda negatif dari ETR menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga lebih agresif.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan APBN-P 2015, pajak menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penerimaan pajak yang tidak mencapai target sering kita lihat. Banyak berita mengenai penerimaan pajak yang tidak mencapai target, meskipun berbagai upaya telah dilakukan pihak pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian yang tengah ditangani dengan serius oleh DJP. Masalah ini adalah akar dari segala permasalahan yang timbul selama ini. Pajak merupakan faktor pendorong di banyak keputusan perusahaan. Bukti terbaru yang termuat di media antara lain kasus Enron, Dynegy, GlaxoSmith-Kline menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui tindakan pajak agresif menjadi fitur yang semakin umum dari perusahaan di banyak negara di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012 : 87). Isu penghindaran pajak telah menjadi masalah sejak awal peraturan

perundang-undangan pajak dan hal ini lazim terjadi dalam setiap masyarakat di mana pajak dipungut (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998: 818). Bagi perusahaan dan pemegang saham, pajak merupakan komponen biaya yang signifikan, sehingga muncul keinginan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Hanlon & Slemrod, 2009: 126). Fakta bahwa pajak mengambil proporsi yang besar dari laba sebelum pajak perusahaan sehingga mengurangi keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham, menjadi alasan untuk penghindaran pajak perusahaan (Annuar et.al, 2014: 151).

Chen et al. (2010) mempelajari implikasi dari tax aggressiveness dan konflik keagenan khusus yang ada dalam perusahaan keluarga, yang didefinisikan sebagai orang-orang di mana anggota keluarga pendiri terus memegang posisi manajemen senior, kursi di dewan direksi atau saham yang relevan sebagai pengendali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Martinez dan Ramalho (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil. Hasil penelitian Martinez dan Ramalho (2014) menunjukkan bahwa

kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan keluarga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak.

Chan et al. (2013) dan Wu et al. (2012) meneliti hubungan antara kepemilikan pemerintah dan penghindaran pajak perusahaan di Cina dan menunjukkan hubungan negatif. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhikari, et.al (2006), yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Pajak mempengaruhi keputusan investasi asing salah satunya adalah desain kebijakan pajak untuk kegiatan di seluruh dunia. Hal ini penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak perusahaan sekarang berpikir secara global, peraturan pajak dan peraturan lainnya masih ditentukan secara nasional. Jika sebagian besar saham perusahaan dipegang oleh pemegang saham asing, hal ini merupakan sinyal bahwa pemegang saham asing memiliki keyakinan dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan asing di saham telah dikaitkan dengan profitabilitas yang tinggi dan efisiensi (Smith, Cin & Vodopivve, 1997). Namun, kehadiran investor asing dikaitkan dengan praktik agresif pajak (Christensen & Murphy, 2004: 43). Terdapat bukti empiris dari penelitian Kinney dan Lawrence (2000) bahwa perusahaan multinasional di Amerika membayar pajak lebih rendah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan pemerintah terhadap tindakan pajak agresif.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan asing terhadap tindakan pajak agresif.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Manajemen dalam menjalankan perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemilik. Akan tetapi, manajemen seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham selaku pemilik perusahaan.

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. Menurut Fama dan Jensen (1983 : 303), masalah keagenan di perusahaan publik muncul karena sifat terbatas dari klaim residual saham biasa, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam kepentingan manajer profesional dengan kepentingan para pemegang saham korporasi. Jika perbedaan tersebut dibiarkan berkembang dan bertahan dalam perusahaan publik, maka manajer akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham untuk diri mereka sendiri (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983).

Secara khusus, teori keagenan berfokus pada hubungan antara manajer dan pemegang saham, sementara tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam masyarakat seperti badan pemerintah (misalnya, otoritas pajak), kelompok politik, serikat buruh, masyarakat, karyawan, dan pelanggan.

2.2. Teori Legitimasi

Suchman (1995: 574) menjelaskan bahwa legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang diinginkan sudah tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem sosial dibangun norma, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi. Legitimasi adalah umum dalam hal ini merupakan evaluasi perlindungan itu sampai batas tertentu, melampaui tindakan yang merugikan tertentu atau kejadian; dengan demikian, legitimasi adalah penyesuaian terhadap peristiwa tertentu. Legitimasi adalah persepsi atau asumsi yang menggambarkan reaksi dari pengamat organisasi karena mereka melihatnya; dengan demikian, legitimasi yang dimiliki secara objektif, namun dibuat secara subyektif. Sebuah organisasi dapat berbeda secara dramatis dari norma sosial. Legitimasi dibangun secara sosial dalam hal itu mencerminkan keselarasan antara perilaku dari entitas yang sah dan bersama (atau diduga bersama) keyakinan dari beberapa kelompok sosial; dengan demikian, legitimasi tergantung pada kolektifitas.

2.3. Tindakan Pajak Agresif

Pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Mengingat tujuan utama memaksimalkan nilai pemegang saham, perusahaan memiliki insentif keuangan untuk mengadopsi strategi pajak yang memungkinkan mereka untuk meminimalkan pajak mereka. Namun, tindakan pajak agresif dapat berdampak buruk reputasi perusahaan, aset yang tak ternilai. Perencanaan pajak agresif tidak selalu memaksimalkan nilai perusahaan, karena dapat mengakibatkan pengeluaran besar (setelah

pemeriksaan pajak), dan itu dapat merusak reputasi perusahaan.

Chen et al (2010 : 42) mendefinisikan tindakan pajak agresif sebagai penggunaan perencanaan pajak untuk membuat penghasilan kena pajak menjadi rendah. Sedangkan Frank et al (2009 : 468) menjelaskan bahwa tindakan pajak agresif merupakan suatu perencanaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik memakai cara yang termasuk penghindaran pajak (tax avoidance) atau tidak (tax evasion) Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan caracara yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian tindakan pajak agresif. Keuntungan tindakan pajak agresif diantaranya:

1. Penghematan pajak, akibatnya bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yang merupakan suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik.

Meskipun tindakan pajak agresif memiliki beberapa keuntungan, namun adapula kerugian dari tindakan pajak agresif perusahaan. Salah satu kerugiannya adalah adanya hukuman yang memberatkan apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan pajak agresif yang merugikan negara.

Ketika menentukan agresivitas pajak, pengambil keputusan melakukan trade off manfaat dan biaya. Manfaat yang paling jelas dari agresivitas pajak yaitu berupa penghematan pajak yang lebih besar. Sementara hal tersebut terhutang kepada pemegang saham, manajer juga mendapatkan keuntungan melalui kompensasi mereka langsung atau tidak langsung, oleh pemegang saham atas upaya mereka dalam manajemen pajak.

Ada beberapa metode untuk mengukur tindakan pajak agresif diantaranya adalah Effective Tax Rate (ETR), Book Tax Different (BTD), Marginal Tax Rate, and Tax Shelter Activity (Hanlon dan Heitzman, 2010). ETR memberikan ringkasan statistik yang tepat tentang efek kumulatif dari perubahan insentif pajak dan tarif pajak perusahaan. ETR menyediakan ringkasan statistik dasar yang menggambarkan kinerja pajak oleh jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan relatif terhadap laba kotor. Langkah ini mencerminkan perencanaan pajak agresif melalui perbedaan buku-pajak permanen. Contoh perencanaan pajak tersebut adalah investasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Chen, 2010).

2.4. Kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak

Martinez dan Ramalho (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif perusahaan pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil. Hasil penelitian Martinez dan Ramalho (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan keluarga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Chen et al (2010) yang menemukan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap tindakan perencanaan pajak. Hasil yang berbeda pula ditemukan oleh Hidayanti dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

2.5. Kepemilikan pemerintah dan penghindaran pajak

Pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam perekonomian negara. Pemerintah memiliki otoritas atas industri yang terkait dengan kesejahteraan mayoritas. Pemerintah atau badan-badan mereka masih mempertahankan kontrol dari sejumlah besar perusahaan terutama di industri utama (Chan et al., 2013 : 1032). Ada temuan yang berbeda dalam studi sebelumnya mengenai kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak.

Kehadiran kepemilikan pemerintah di perusahaan ditandai dari adanya perusahaan seperti Government linked Companies (GLCs) atau di Indonesia disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lau & Tong, 2008). Untuk negara berkembang, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan usaha tidak dapat dikesampingkan (Adhikari et al, 2006). Zeng (2010) mempelajari kepemilikan pemerintah dan agresivitas pajak di perusahaan China yang terdaftar selama periode 1998-2008 dan menemukan bahwa kepemilikan pemerintah kurang agresif dalam melakukan tindakan perencanaan pajak (atau menghindari agresivitas pajak).

Penelitian lain dengan menggunakan semua perusahaan kecuali lembaga keuangan di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen antara tahun 2003 dan 2009 dilakukan oleh Chan et al. (2013) dan menemukan bahwa manajer perusahaan yang dikendalikan pemerintah memiliki tujuan politik untuk melindungi pendapatan pemerintah, dan mereka mendorong perusahaan mereka untuk menghindari mengejar perencanaan pajak agresif. Bukti mereka berarti bahwa perusahaan yang dikendalikan pemerintah mengejar strategi pajak kurang agresif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non-dikendalikan-pemerintah. Sejak kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk koneksi politik, ditemukan Adhikari et al. (2006) bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan lebih agresif dalam perencanaan pajak.

Wu et al. (2012) menyelidiki efek yang berbeda dari koneksi politik pada kinerja perusahaan dari perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta di Cina. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan swasta dengan manajer terhubung secara politik memiliki ETR yang lebih rendah daripada mereka yang tidak manajer koneksi

politik. Namun, apakah BUMN lokal dan BUMN pusat memiliki manajer yang terhubung secara politik atau tidak, tidak mempengaruhi ETR mereka.

2.6. Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan salah satu sarana penting dimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan kepada masyarakat di mana ia beroperasi. D'souza, Megginson & Nash (2001) menemukan bahwa kepemilikan asing saham berhubungan positif dengan profitabilitas yang tinggi dan efisiensi. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian dari Smith, Cin & Vodopivec (1997) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif kepemilikan saham oleh asing terhadap profitabilitas dan efisiensi perusahaan, semakin besar porsi kepemilikan asing di perusahaan, semakin efisien dan profitable perusahaan tersebut. Namun, kehadiran investor asing telah dikaitkan dengan tindakan pajak agresif (Christensen & Murphy, 2004). Secara empiris, perusahaan multinasional US ditemukan membayar pajak rendah di negara-negara tuan rumah mereka meskipun tingkat profitabilitas tinggi.

Huizinga dan Nicodeme (2006) menyelidiki hubungan antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan badan di antara beberapa negara Eropa. Studi ini menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat yang lebih tinggi dari kepemilikan asing, memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling melengkapi antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan badan.

Demircuc-Kunt dan Huizinga (2001) menguji hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak antara beberapa bank di 80 negara di seluruh dunia. Dengan periode delapan tahun, analisis global menunjukkan bahwa bank-bank asing membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan bank-bank domestik di negara-negara asal. Hal ini juga menemukan bahwa bank-bank tersebut menggunakan strategi pergeseran laba untuk menghindari pembayaran pajak.

Salihu (2015) menemukan hubungan positif yang signifikan antara kepentingan investor asing dan langkah-langkah penghindaran pajak perusahaan antara perusahaan Malaysia yang besar. Hasil ini menunjukkan kemungkinan perusahaan multinasional memanfaatkan skala internasional operasi mereka untuk menghindari pajak di kedua negara domisili maupun di negara tempat induk perusahaan. Di Indonesia, Rusydi dan Martani (2014) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan asing dan agresivitas pajak.

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan beberapa penelitian terdahulu di atas, hipotesis penelitian yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif

perusahaan.

H2 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

H3 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data, Populasi, dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar selama jangka waktu penelitian di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah:

- Perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2014.
- Perusahaan melaporkan data keuangan yang lengkap dan diaudit oleh akuntan publik.
- Tersedianya informasi lengkap untuk pengukuran variabel yang diteliti.
- Perusahaan tidak mengalami kerugian operasional diantara periode penelitian, hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia bahwa kerugian dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya (Adhikari et al, 2006 : 580).
- Perusahaan dengan ETR lebih besar dari 1. Karena ETR lebih besar dari 1 dapat dikarenakan adanya konsolidasi antara anak perusahaan yang mengalami keuntungan bersih dengan yang mengalami kerugian bersih. Atau dapat juga disebabkan karena beban pajak untuk asset yang dijual pada tahun sebelumnya yang menimbulkan keuntungan diakui pada periode berikutnya (Adhikari et al, 2006 : 580).

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendefinisikan tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal maupun tidak legal.

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur tingkat tindakan pajak agresif seperti dalam penelitian Adhikari, et.al (2006). ETR merupakan refleksi dari perbedaan perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Ada beberapa metode untuk mengukur nilai *Effective Tax Rate*, namun dalam penelitian ini, akan digunakan metode yang digunakan seperti dalam penelitian Adhikari, et al (2006).

Rumus untuk mengukur ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense} - \text{deferred tax}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	ETR	FAMZ	GOV	FOR	ROA	LEV	CAPINT	SIZE
Mean	25.03	20.17	18.59	31.22	14.3	48.12	43.96	31.24
Median	24	2.84	0	24.75	11.82	45.05	44.42	30.76
Maximum	75.77	76.47	75	94.71	54.36	91.78	92.68	43.24
Minimum	2.85	0	0	0	-1.72	10.86	0.39	27.94
Std. Dev.	9.24	25.7	28.21	29.06	11.36	22.47	27.71	1.8
N	178	178	178	178	178	178	178	178

Catatan: ETR = (tax expenses – deferred tax expenses)/pre-tax income; FAMZ = prosentase kepemilikan saham oleh keluarga; GOV = prosentase kepemilikan saham oleh pemerintah; FOR = prosentase kepemilikan saham oleh asing; ROA = laba usaha/total asset; LEV = total hutang/total asset; CAPINT = total asset tetap/total asset; SIZE = logaritma natural total asset.

Dimana:

ETR : *Effective tax rate*
 Total Tax : Total beban pajak
 Expense
 Deffered Tax : Nilai pajak tangguhan
 Pre tax income : Laba sebelum pajak

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Masing-masing struktur kepemilikan perusahaan diukur dalam bentuk prosentase.

3.2.2.1. Kepemilikan keluarga

FAMZ menunjukkan kepemilikan keluarga. Definisi perusahaan keluarga oleh Laporta, et al (1999) adalah kepemilikan saham oleh semua individu dan perusahaan tertutup yang kepemilikannya tercatat (di Indonesia, kepemilikan > 5% wajib dicatat). Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan publik, BUMN atau kepemilikan oleh pemerintah, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu atau lembaga yang kepemilikannya tidak wajib dicatat) tidak dianggap sebagai bagian dari kepemilikan keluarga. Akan tetapi untuk perusahaan public yang memiliki saham di dalam sebuah perusahaan public, akan diketahui presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh keluarga.

Dari pengertian kepemilikan keluarga oleh Laporta, et al (1999) di atas, maka kepemilikan keluarga dalam penelitian ini diukur sebagai jumlah total persentase kepemilikan saham yang tercatat di perusahaan oleh selain yang dimiliki oleh negara, institusi keuangan, dan individu publik. Data kepemilikan saham diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.2.2.2. Kepemilikan pemerintah

GOV menunjukkan kepemilikan pemerintah dan diukur sebagai persentase saham yang dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk total kepemilikan saham dari perusahaan (Ghazali & Weetman, 2006).

3.2.2.3. Kepemilikan Asing

FOR menunjukkan kepemilikan asing. Jika sebagian besar saham perusahaan yang sedang dipegang oleh pemegang saham asing, kemungkinan hal ini menunjukkan sinyal bahwa pemegang saham asing memiliki keyakinan dalam perusahaan tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan naiknya nilai perusahaan. Kepemilikan asing dalam penelitian ini diukur sebagai proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing baik individu maupun perusahaan (Ghazali, 2010).

3.2.3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol sesuai dengan penelitian Annuar et al (2014) untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan pajak agresif. Variabel kontrol yang digunakan adalah ROA, LEV, Capital Intensity dan SIZE.

1. ROA adalah *Return on Assets* untuk perusahaan. Diukur dengan membagi operating income dengan total aset. Lin et al (2014) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan lebih menguntungkan menunjukkan efek substitusi lebih sensitif antara agresivitas pajak perusahaan dan kebijakan utang perusahaan
2. LEV adalah *Leverage* untuk perusahaan diukur dengan membagi total utang dengan total aset. Lin et al (2014) menemukan model tradeoff dari struktur modal yang memungkinkan *leverage* untuk menjadi bagian dari pilihan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Penggunaan utang berbanding terbalik dengan agresi pajak perusahaan untuk sebagian besar perusahaan
3. *Capital Intensity* adalah Nilai asset tetap untuk perusahaan dibagi dengan nilai total aset.
4. SIZE adalah Nilai logaritma natural total aset untuk perusahaan pada awal tahun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai anggota LQ45 dari tahun 2010 hingga tahun 2014 total perusahaan tersebut ada 76 perusahaan. Adapun sampel yang dipakai dalam penelitian ini hanya berjumlah 54 perusahaan.

4.1. Analisis deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif sampel dalam penelitian ini. Dengan jumlah sampel sebanyak 178, nilai rata-rata untuk variabel ETR (Effective Tax Rate) adalah sebesar 25,03 dengan standar deviasi 9,24. Nilai maksimum dari ETR adalah 75,77 sedangkan nilai minimumnya adalah 2,85. Dari nilai rata-rata sampel penelitian ini, terlihat bahwa ETR mendekati tariff normal yang berlaku umum pada tahun 2015 yaitu sebesar 25%. Untuk variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing diketahui bahwa nilai rata-rata untuk kepemilikan keluarga adalah sebesar 20,17 dengan standar deviasi sebesar 25,70. Kepemilikan pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 18,59 dan standar deviasi sebesar 28,21. Dan untuk kepemilikan asing, nilai rata-rata kepemilikan asing adalah sebesar 31,22 dengan standar deviasi sebesar 29,06.

Untuk variabel kontrol, ROA memiliki nilai standar deviasi sebesar 11,36 dan rata-ratanya sebesar 14,30. Variabel kontrol untuk leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 48,12 dengan standar deviasi sebesar 22,47. Variabel capital intensity memiliki nilai rata-rata sebesar 43,96 dengan standar deviasi 27,71. Dan yang terakhir adalah variabel ukuran perusahaan, memiliki nilai rata-rata 31,23 dan standar deviasinya sebesar 1,80.

4.2. Uji hipotesis

4.2.1. Pemilihan Model

Dari ketiga model regresi data panel yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (Common Effect (CE), Fixed Effect (FE) atau Random Effect (RE)) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: F Test (Chow Test), Hausman Test dan Langrange Multiplier (LM) Test.

4.2.1.1. F Test (Chow Test)

Dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect. Tabel 2 berikut menunjukkan hasil Chow test:

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.154904	(53,117)	0.0000
Cross-section Chi-square	257.178871	53	0.0000

Sumber: data diolah (2015)

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model CE.

4.2.1.2. Hausman Test

Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect. Tabel 3 berikut menunjukkan hasil Hausman test:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.923	7	0.0084

Sumber: data diolah (2015)

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section random sebesar 0,0084 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model RE.

Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini, model FE (*Fixed Effect*) lebih baik daripada model CE (*Common Effect*) dan RE (*Random Effect*), tanpa harus dilakukan uji selanjutnya (LM Test).

Berdasarkan hasil pengujian untuk pemilihan model regresi data panel, maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Tabel 4 berikut ini adalah hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FE)

variable	P.sign	coefficient	t	sign
FAMZ	-	-0.5389	-2.080	0.0397
GOV	-	1.1375	2.264	0.0254
FOR	-	0.3174	1.435	0.1540
ROA		-0.220	-1.922	0.0571
LEV		0.2456	1.843	0.0679
CAPINT		-0.1883	-1.912	0.0583
SIZE		0.4433	0.850	0.3973
Coefficient				-9.406084
Adjusted R-squared				0.659277
F-statistic				6.708062
				0.000000

Catatan: ETR = (tax expenses – deferred tax expenses)/pre-tax income; FAMZ = prosentase kepemilikan saham oleh keluarga; GOV = prosentase kepemilikan saham oleh pemerintah; FOR = prosentase kepemilikan saham oleh asing; ROA = laba usaha/total asset; LEV = total hutang/total asset; CAPINT = total asset tetap/total asset; SIZE = logaritma natural total asset.

4.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Dalam uji DW, setelah diperoleh nilai DW, maka nilai hasil hitung DW dibandingkan dengan nilai tabel durbin-watson.

Tabel 5. Hasil Uji Durbin Watson

Log likelihood	-515.26	Hannan-Quinn criter.	6.9171
F-statistic	6.708	Durbin-Watson stat	2.1742

Sumber: data diolah (2015)

Dari tabel 5, diketahui nilai dw sebesar 2,17424. Tabel durbin-watson untuk sampel sebanyak 178 dan nilai k sebesar 7 diperoleh nilai du sebesar 1,82482. Sehingga diketahui bahwa nilai dw hitung berada di antara $1,82482 < 2,17424 < 2,1752$. Karena nilai dw terletak diantara du dan 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui model regresi dalam penelitian ini terjadi heteroskedastisitas atau tidak, digunakan Uji White.

Tabel 7 Hasil Uji White

Model	R	R Square	Adjusted R Square
	.621	.385	.296

Sumber: data diolah (2015)

Dari tabel di atas, nilai R^2 adalah 0,385. Sehingga diperoleh nilai c^2 adalah $0,385 \times 178$ yaitu 68,53. Sedangkan nilai c^2 tabel adalah 210,13. Karena c^2 hitung $< c^2$ tabel, maka dalam model ini, tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	FAMZ	GOV	FOR	ROA	LEV	CAPINT	SIZE
FAMZ	1.00						
GOV	-0.50	1.00					
FOR	-0.57	-0.15	1.00				
ROA	-0.12	-0.11	0.36	1.00			
LEV	-0.142	0.28	-0.06	-0.49	1.00		
CAPINT	-0.002	-0.19	0.17	0.30	-0.48	1.00	
SIZE	-0.18	0.19	0.09	-0.31	0.47	-0.37	1.00

$ETR = (\text{tax expenses} - \text{deferred tax expenses}) / \text{pre-tax income}$; FAMZ = prosentase kepemilikan saham oleh keluarga; GOV = prosentase kepemilikan saham oleh pemerintah; FOR = prosentase kepemilikan saham oleh asing; ROA = laba usaha/total asset; LEV = total hutang/total asset; CAPINT = total asset tetap/total asset; SIZE = logaritma natural total asset.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

4.2.5. Koefisien determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Adjusted R² adalah di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilainya atau mendekati 1, menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan Tabel 4. Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah sebesar 65,93%. Artinya bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan perusahaan, ROA, PPE, Leverage dan Ukuran Perusahaan hanya mampu menjelaskan 65,93% variabel dependen dalam hal ini adalah tax aggressive yang diukur dengan menggunakan ETR. Sebesar 34,07% tax aggressive dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.2.6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,7081 dengan signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan perusahaan, ROA, *Capital Intensity*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen tax aggressiveness yang diukur dengan menggunakan ETR.

4.2.7. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari tabel 4, terlihat bahwa variabel independen kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing, hanya kepemilikan asing yang tidak signifikan mempengaruhi tax aggressiveness. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,154 atau di atas 0,05.

Kepemilikan keluarga memiliki nilai koefisien sebesar -0,5389 dengan signifikansi 0,0397 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Tanda negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk lebih agresif dalam melakukan perencanaan penghindaran pajak.

Untuk kepemilikan pemerintah, diketahui bahwa koefisien untuk variabel kepemilikan pemerintah adalah sebesar 1,1375 dengan signifikansi sebesar 0,0254 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan pemerintah mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan. Tanda positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki kecenderungan untuk kurang

agresif dalam melakukan perencanaan penghindaran pajak. Dalam arti bahwa kepemilikan pemerintah justru cenderung untuk membantu pemerintah dalam upaya pemenuhan target perpajakan.

Pada variabel kepemilikan asing, diketahui bahwa koefisien untuk variabel kepemilikan asing adalah sebesar 0,3174 dengan signifikansi sebesar 0,1540 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan. Untuk variabel ROA memiliki nilai koefisien sebesar -0,2199. Sedangkan untuk variabel leverage memiliki nilai koefisien sebesar 0,2456. Untuk variabel Capital Intensity dan ukuran perusahaan masing-masing memiliki nilai koefisien sebesar -0,1882 dan 0,4433.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan diterima. Hal ini berarti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak pengusaha di Indonesia memiliki grup atau perusahaan di luar negeri dengan tariff pajak yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martinez & Ramalho (2014) yang menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif di Brazil dan menemukan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif dalam penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Hidayanti dan Laksito (2013) dan Chen et al (2010) yang tidak menemukan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hasil penelitian ini disebabkan karena perusahaan keluarga beranggapan bahwa manfaat yang diperoleh akibat dari penghindaran pajak tidak lebih besar daripada ancaman hukumannya. Berbeda dengan di Indonesia, dari hasil penelitian ini justru tampak bahwa perusahaan keluarga lebih agresif dalam upaya melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan berbagai hal antara lain permasalahan ketegasan hukum, sosial politik, budaya di Indonesia yang berbeda dengan di China. Namun hal tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan ditolak. Hal ini dikarenakan kepemilikan pemerintah justru berpengaruh positif terhadap tindakan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mendukung pemerintah dalam pencapaian target penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chan et al (2013), Zeng (2010) dan Wu et al (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan pemerintah kurang agresif tindakan pengurangan pajak perusahaan. Akan tetapi, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhikari, et.al (2006), yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan

memiliki ETR lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak terhubung secara politik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah, maka akan semakin kurang agresif dalam upaya penghindaran pajak. Hal ini berarti baik baik penerimaan negara apabila pemerintah bertindak sebagai mayoritas pemilik saham di sebuah perusahaan.

Sedangkan untuk hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan ditolak. Hal ini disebabkan karena tanda positif pada koefisien untuk kepemilikan asing memiliki arti bahwa perusahaan kurang agresif dalam melakukan pengurangan pajak dan hasil uji t juga dinyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan asing dengan tindakan pajak agresif perusahaan tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan temuan Demircuc-Kunt & Huizinga (2001) di perbankan 80 negara di dunia dan penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Salihu et al (2015) yang menemukan bahwa perusahaan dimana asing memiliki keterlibatan, memberikan dampak positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Sedangkan penelitian Egger et al (2010) menemukan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan pada negara dengan kriteria high tax country dan hubungan negatif pada Negara dengan kriteria *low tax country*. Sedangkan Huizinga (2006) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap beban pajak, terutama di negara kecil dan berkembang. Semakin tinggi kepemilikan asing akan cenderung berfungsi untuk mengurangi distorsi dalam pajak internasional (Huizinga, 2006).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan asing terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya implikasi bahwa perusahaan yang dimiliki oleh asing akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku di tempat perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan anggapan internasional bahwa perusahaan asing patuh terhadap peraturan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Struktur kepemilikan perusahaan yang terbagi menjadi tiga kepemilikan antara lain kepemilikan oleh keluarga, pemerintah, dan asing masing-masing memiliki hasil yang berbeda pengaruhnya terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, yang berarti bahwa kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, tanda positif menunjukkan bahwa perusahaan cenderung kurang agresif dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Sedangkan untuk kepemilikan asing menunjukkan tidak ada

pengaruh antara kepemilikan asing terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh keluarga cenderung lebih melakukan upaya penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan perusahaan di negara *Tax Haven Country* yang dimiliki oleh keluarga konglomerat.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang kepemilikannya oleh keluarga, akan cenderung semakin agresif dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Hal ini membawa implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan perhatian lebih terhadap pembayaran pajak untuk perusahaan dengan porsi kepemilikan keluarga yang besar.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan effective tax rate (ETR) sebagai proksi dari tindakan pajak agresif. Akan tetapi ETR sendiri kurang menjelaskan jenis pajak atau bagian mana perusahaan melakukan tindakan perencanaan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambahkan proksi lain antara lain *Book to Different* dan
2. Nilai Adjusted R square sebesar 65,93% menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen dalam hal ini adalah kepemilikan perusahaan, ROA, leverage, Property Plant Equipment dan ukuran perusahaan relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, A., Derashid, C., Zhang, H., 2006. Public policy, political connections, and effective rate rates: longitudinal evidence from Malaysia. *Journal Account. Public Policy* 25: 54-595.

Andreoni, J., Erard, B., dan Feinstein, J. 1998. Tax compliance. *Journal of Economic Literature* 36: 818-860.

Annuar, H. A., Salihu, I. A., dan S.N.S. Obid. 2014. Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia Social Behavioral Sciences* 164: 150-160.

Chan, K. H., Mo, P. L. L. dan Zhou, A. Y. 2013. Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China. *Accounting dan Finance*, 53, 1029-1051.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. dan Shevlin, T. 2010. Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.

Christensen, J. dan Murphy, R. 2004. The social irresponsibility of corporate tax avoidance: taking CSR to the bottom line. *Development* 47: 37-44.

D'souza, J., Megginson, W. & Nash, R. 2001. Determinants of performance, improvements in privatized firms: the role of restructuring and

corporate governance. working paper. available on www.ssrn.com

Demirguc-Kunt, A. & Huizinza, H. 2001. The taxation of domestic and foreign banking. *Journal of Public Economics* 793: 429-453.

Desai, M. A. & Dharmapala, D. 2009. Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics* 913: 537-546.

Desai, M. A. dan Dharmapala, D. 2006. Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.

Faccio, M., Masulis, R. dan McConnell, J. J. 2006. Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance* 61, 2597-2635.

Fama, E. F. dan Jensen, M. C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics* 26 (2): 301-325.

Frank, M. M., Lynch, L. J. & Rego, S. O. 2009. Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review* 84: 467-496.

Ghazali, Imam. 2013. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Graham, J.R. dan Tucker, A.L. 2006. Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics* 81: 563-594.

Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.

Hanlon, M. & Slemrod, J. 2009. What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics* 93: 126-141.

Hidayanti, A. N. dan Laksito, H. 2013. Pengaruh antara kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif. *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (2): 1-12.

Huizinga, H. & Nicodeme, G. 2006. Foreign ownership and corporate income taxation: an empirical evaluation. *European Economic Review* 505: 1223-1244.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.

Kinney, M. & Lawrence, J. 2000. An analysis of the relative US tax burden of US corporations having substantial foreign ownership. *National Tax Journal* 53: 9-22.

La Porta, R., Florencio, D., dan Andrei, S. 1999. Corporate Ownership Around the World. *The Journal of Finance* LIV (2) : 471-517.

Lanis, R. dan Richardson, G. 2012. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal Account Public Policy* 31 : 86-108.

Lau, Y.W. dan Tong, C. Q. 2008. Are Malaysian Government-Linked Companies GLCs Creating

- Value? *International Applied Economics and Management Letters* 11: 9-12.
- Lin, S., N. Tong, dan A. L. Tucker. 2014. Corporate tax aggression and debt. *Journal of Banking & Finance* 40: 227-241.
- Martinez, A. L. dan Ramalho, G. C. 2014. Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil. *International Business Research* 7 (3): 129-137.
- Mohd Ghazali, N. A. & Weetman, P. 2006. Perpetuating traditional influences: voluntary disclosure in Malaysia following the economic crises. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15: 226-248
- Mohd Ghazali, N. A. 2010. Ownership structure, corporate governance and corporate performance in Malaysia. *International Journal of Commerce and Management* 202: 109-119.
- Peng, M. W. & Jiang, Y. 2010. Institutions behind family ownership and control in large firms. *Journal of management Studies* 472: 253- 273.
- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* 17.
- Rahayu, S. Aisyah. T. 2012. Modul laboratorium ekonometrika dengan aplikasi eviews. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rusydi, M. K. dan Dewi, M. 2014. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi* 17.
- Salihu, I. A., H.A. Annuar., dan S. N. S. Obid. 2015. Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 11: 138-147.
- Scott, William. R. 2012. *Financial accounting theory* 6th edition. Toronto: Pearson Canada.
- Smith, S., Cin, B. & Vodopivve, M. 1997. Privatization incidence, ownership forms and firm performance: evidence from Slovenia. *Journal of Comparative Economics*, 25, 158-179.
- Stickney, C., McGee, V., 1982. Effective corporate tax rates: the effect of size, capital intensity, leverage and other factors. *Journal Account. Public Policy* 1: 23-45.
- Suchman, M. C. 1995. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review* 20 (3): 571-610.
- Thillainathan, R. 1999. Corporate governance and restructuring in Malaysia: a review of markets, mechanisms, agents and the legal infrastructure. Paper prepared for the joint World Bank/OECD Survey of Corporate Governance arrangements in a selected number of Asian countries.
- Wu, L., Wang, Y., dan Gillis, P. 2012. State ownership, tax status and size effect on effective tax rate in China. *Accounting and Business Research* 42 (2) : 97-114.
- Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D. & Jiang, Y. 2008. Corporate governance in emerging economies: a review of principal-principal perspective. *Journal of Management Studies* 45: 196-220.
- Zeng, Tao. 2010. Ownership Concentration, State Ownership, and Effective Tax Rates: Evidence from China's Listed Firms. *Accounting Perspectives* 9 (4): 271-289.